VOICE OF INTEGRITY
“NOTHING BUT INTEGRITY”
1-15 DESEMBER 2021

SEKAPUR SIRIH

IntegrityTalk.ID, sebuah forum anak muda antikorupsi dari berbagai daerah dibangun oleh SPAK Indonesia sebagai upaya memperluas gerakan yang berbasis pada kesadaran akan nilai-nilai antikorupsi. Forum ini dibangun mengikuti desain gerakan SPAK dan diharapkan suatu hari akan menjadi gerakan yang kuat dan berkembang.

Forum ini di awal diikuti oleh komunitas anak muda dari 5 wilayah, yaitu SAKA (Aceh), SAKSI (Gorontalo), Leaders (Gorontalo), SPAK Muda (Banten dan Makassar), Tapele.id (Papua). Namun kemudian bergabung juga beberapa komunitas anak muda dari daerah-daerah lain, seperti Jakarta, Kuningan, Cimahi, Yogyakarta, NTB, dan Bali. Kolaborasi adalah salah satu ciri forum ini dalam melakukan kegiatan, membangun jejaring dengan berbagai lembaga dan organisasi lain. Tujuan kolaborasi adalah untuk memperkuat jaringan serta membawa korupsi menjadi isu arus utama di berbagai sektor.

Semangat kolaborasi inilah yang menjadi dasar dari penyelenggaraan Voice of Integrity 2021 dengan tema "*Nothing but Integrity*". Acara untuk merayakan hari antikorupsi sedunia ini merupakan temu daring berbagai komunitas dan lembaga yang membahas berbagai upaya membangun integritas di sektor-sektor yang berbeda. Voice of Integrity 2021 dipilih menjadi acara pembuka rangkaian kegiatan Values 20 (V20), sebuah *engagement group* atau kelompok yang tidak terpisahkan dari G20, yang memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan G20 selalu berlandaskan nilai-nilai kehidupan. Kesamaan dalam penekanan pada nilai-nilai kehidupan inilah yang membuat V20, melalui Nenilai penyelenggara V20 Indonesia, mengajak SPAK Indonesia dan IntegrityTalk.ID untuk berkolaborasi, dan penyelenggaraan Voice of Integrity 2021 adalah salah satu bentuk kegiatannya.

Acara yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2021 ini dibuka oleh Dr. Edi Prio Pambudi, S.E., M.A., Co-Sherpa G20 Indonesia dan Koordinator Harian I Bidang Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia 2022 dan juga diisi antara lain oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Alissa Wahid sebagai Co Sherpa V20, Salman Subakat, CEO PT Paragon Technology and Innovation, Diah Saminarsih, penasihat senior gender dan pemuda Direktorat Jenderal WHO dan pembicara lain yang memiliki pengalaman panjang di bidang masing-masing. Topik-topik yang didiskusikan dalam Voice of Integrity 2021 mengaitkan korupsi dengan sektor-sektor lain seperti seni, lingkungan hidup, pendidikan, budaya, demokrasi, disabilitas, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Anak-anak muda yang ikut mengisi sesi-sesi panel adalah para pegiat dari organisasi dan komunitas yang dibangun oleh dan untuk mereka, seperti Pemimpin.id, 10 Pemuda, Pandemic Talks, dan Wings of Bangtan.

Voice of Integrity 2021 diharapkan tidak berhenti sebagai momentum selebrasi semata, namun sebuah forum diskusi yang menghasilkan pemikiran-pemikiran untuk dikembangkan menjadi inisiatif-inisiatif baru dalam melawan korupsi. Oleh karenanya, disusunlah buku prosiding ini.

Semoga buku prosiding ini dapat merekam pemikiran, ide dan pernyataan sikap anak-anak muda yang akan menjadi kontribusi dalam upaya-upaya membangun Indonesia yang bebas dari korupsi.

Salam,
Maria Kresentia
Direktur SPAK Indonesia

Daftar Isi

BAGIAN I PROSIDING VOICE OF INTEGRITY: "*NOTHING BUT INTEGRITY*" 2

BAGIAN II ANTIKORUPSI DAN PENDIDIKAN NILAI-NILAI INTEGRITAS 12

BAGIAN III ANTIKORUPSI, ANAK MUDA DAN PEMERINTAHAN 18

BAGIAN IV ANTIKORUPSI DAN DIFABEL 28

BAGIAN V ANTIKORUPSI, DEMOKRASI DAN PEMERINTAHAN 32

BAGIAN VI ANTIKORUPSI DAN SENI 40

PENUTUP 44

BAGIAN I

PROSIDING VOICE OF INTEGRITY:

"NOTHING BUT INTEGRITY"

RUANG VIRTUAL: 1 – 15 DESEMBER 2021

BAGIAN I
PROSIDING VOICE OF INTEGRITY: *"NOTHING BUT INTEGRITY"*
RUANG VIRTUAL: 1 – 15 DESEMBER 2021

A. Pengantar

LATAR BELAKANG

Sejak diluncurkan pada 2014, gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) lalu menjadi organisasi mandiri SPAK Indonesia pada 2019 hingga saat ini, para relawan terus konsisten melakukan pencegahan korupsi melalui pendidikan nilai-nilai antikorupsi. Salah satu nilai yang dimaksud adalah integritas. Integritas adalah praktik bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral dan etika yang kuat. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau keakuratan tindakan seseorang.[1] Memiliki integritas berarti kita hidup sesuai dengan nilai-nilai terdalam kita, kita jujur kepada semua orang, dan kita selalu menepati janji. Ini adalah nilai yang membuat kita menolak untuk berkompromi. Selanjutnya, analisis setiap pilihan yang kita buat untuk memastikan bahwa kita melakukan hal yang benar.

SPAK Indonesia telah menerjemahkan nilai integritas dalam momen-momen kehidupan sehari-hari pada berbagai perspektif, baik individu, sosial dan profesional. Melalui pelatihan dengan pendekatan reflektif, para Agen SPAK (para perempuan penggerak perubahan di 34 provinsi Indonesia) yang menjadi relawan SPAK Indonesia, telah membuktikan bahwa nilai ini telah memandu perilaku mereka untuk memutuskan tentang apa yang dipikirkan sebagai benar, salah, adil, tidak adil, dst. Dalam konteks individu, nilai ini telah menjadi sikap yang kemudian secara sosial tumbuh menjadi *shared values* di dalam komunitas mereka. Secara profesional, mereka mendorong melalui perubahan kebijakan-kebijakan.

Berdasarkan catatan banyaknya perubahan yang telah terjadi, antara lain pembentukan "meja tanpa laci" oleh Agen SPAK Polwan Polsek Panakkukang, Makassar; pembentukan kebijakan "antrian elektronik" oleh Agen SPAK Hakim di Pengadilan Agama Lamongan, Jawa Timur; pembentukan kebijakan "denda bagi mereka yang meluluskan permintaan kawin anak" oleh Agen SPAK Kepala Desa Mallari, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan; pembentukan "Kode Etik Sekolah" oleh beberapa Agen SPAK Guru, dll, kami sangat percaya bahwa pemahaman nilai menjadi sangat penting dalam pembuatan kebijakan untuk memastikan keberpihakannya pada pengembangan peradaban.

Hal tersebut di atas ternyata sejalan dengan apa yang menjadi pesan inti dari Ketua dan Pendiri V20 (Values 20) Al-Sheikh: *"Values-based policies can improve people's lives around the world."* Pernyataan ini adalah respon terhadap banyaknya kebijakan yang disusun tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kehidupan, sehingga tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Untuk itu forum V20 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*engagement group*) dari G20 terus melakukan advokasi-advokasi tentang pentingnya nilai-nilai dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan di berbagai sektor untuk dapat memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Integritas

Sejalan dengan terpilihnya Presiden Joko Widodo untuk memimpin KTT G20 periode 2021-2022, maka penyelenggaraan V20 sebagai bagian dari G20 pun dilimpahkan pada Indonesia, terhitung sejak 15 Oktober 2021. Di tanggal 17 Agustus 2021, SPAK Indonesia dengan dukungan AIPJ2 (Australia Indonesia Partnership for Justice) membangun sebuah forum anak muda antikorupsi dari beberapa komunitas/organisasi di berbagai daerah yang dinamakan IntegrityTalk.id. Salah satu acara puncak bagi IntegrityTalk.id adalah penyelenggaraan Voice of Integrity 2021 yang dijadikan acara pembuka rangkaian kegiatan V20 Indonesia. Forum yang direncanakan menjadi acara tahunan ini, dimaksudkan untuk terus menyuarakan pentingnya nilai integritas sebagai salah satu nilai dasar untuk membangun kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.

Voice of Integrity 2021 mengambil tema "*Nothing but Integrity*". Dengan tema ini, kami Ingin menyampaikan bahwa integritas bukanlah konsep yang mudah untuk didefinisikan. Bahkan lebih sulit untuk menginternalisasi, mengolah, dan menerapkannya secara konsisten pada masa dimana dunia, termasuk Indonesia telah banyak mengalami pergeseran terhadap apa yang dianggap benar. Tetapi tidak ada yang lebih penting dan mendasar dari pada integritas untuk membangun kesejahteraan bangsa.

Kami berharap agar dalam forum ini, berbagai elemen masyarakat dapat saling berbagai pengalaman, tantangan yang dihadapi serta rencana kedepan dalam memastikan nilai integritas diterapkan secara konsisten di berbagai sektor kehidupan sehingga mampu mendorong perubahan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik.

B. Tujuan

- Mendukung kerja V20 untuk mengangkat pentingnya nilai-nilai dalam masyarakat sebagai basis pengambilan kebijakan oleh forum G20.
- Membangun forum diskusi dan berbagi tentang pentingnya nilai integritas termasuk dalam melawan korupsi dan perilaku koruptif yang menjadi penyebab berbagai pelanggaran keadilan serta perusakan peradaban.
- Menciptakan forum kolaborasi dan jejaring (nasional maupun internasional) dari berbagai elemen masyarakat dengan visi yang sama, untuk saling belajar dan berbagi dalam mewujudkan berbagai inisiatif praktek-praktek nilai integritas.
- Memetakan poin-poin pembelajaran untuk bisa digunakan dalam melakukan proses pendidikan pada masyarakat luas dan advokasi kebijakan pada pihak yang relevan sebagai upaya mendorong perubahan yang berkelanjutan.

C. Kolabolator

Rangkaian *Voice of Integrity 2021* terselenggara berkat kolaborasi dan dukungan dari organisasi berikut ini:

SPAK Indonesia

SPAK Indonesia adalah organisasi mandiri yang didirikan dengan tujuan mengelola dan menjaga keberlanjutan Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) yang diluncurkan pada tanggal 22 April 2014 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ).

Dalam gerakannya, SPAK Indonesia menempatkan perempuan sebagai pemegang peran penting dalam pencegahan korupsi. Hal ini berdasarkan pada hasil survey yang dilakukan KPK tahun 2012-2013 di Solo dan Yogyakarta yang menunjukkan fakta bahwa ternyata hanya 4% orangtua yang mengajarkan kejujuran pada anaknya. Berlandaskan bahwa peran perempuan/Ibu sentral dalam keluarga dalam menanamkan nilai moral pada anak-anaknya, maka SPAK Indonesia percaya bahwa perempuan memiliki kesempatan strategis dalam pencegahan korupsi dengan kemungkinan keberhasilan yang tinggi.

IntegrityTalk.ID

IntegrityTalk.id adalah ruang untuk membangun peradaban milik anak muda Indonesia dengan cara kreatif, inklusif, terbuka dan berintegritas dalam menyebarkan nilai-nilai antikorupsi dan membangun pulau-pulau antikorupsi di Indonesia.

Gerakan INTEGRITYTALK.ID mewadahi anak-anak muda yang ingin berperan dalam pemberantasan korupsi dengan berlandaskan pada kesadaran akan pentingnya nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesadaran ini mereka dapat melakukan perubahan dimulai dari diri sendiri, dan selanjutnya pada lingkungan yang lebih luas.

Desain gerakan ini sama dengan gerakan SPAK dan diharapkan dapat mencatat berbagai perubahan yang berkelanjutan, seperti yang telah dilakukan juga oleh banyak Agen SPAK di Indonesia. Gerakan INTEGRITYTALK.ID di inisiasi oleh SPAK Indonesia dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).

Nenilai

Nenilai adalah inisiatif antara Unit Staf Ahli Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Bappenas dan DayaLima Abisatya untuk membangun Indonesia melalui identifikasi dan dialog bermakna tentang nilai-nilai yang penting bagi individu, komunitas, dan bangsa. Bagi Nenilai, memahami nilai-nilai yang masyarakat yakini, saksikan, dan yang ingin masyarakat wujudkan sebagai sebuah bangsa adalah bekal untuk bersama-sama membangun Indonesia ke arah yang lebih baik.

Nenilai mengumpulkan dan mengolah data melalui survey identifikasi dan dialog bermakna dengan framework 7 Levels of Consciousness dari Barrett Values Centre. Data-data ini dapat menjadi landasan untuk menentukan langkah berikutnya bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih baik.

V20

Value 20 (V20) adalah komunitas global para pakar dan praktisi nilai yang berupaya terlibat secara aktif dengan Group of 20 (G20) yang diluncurkan pada 2020. V20 bergerak untuk memperdalam pemahaman nilai-nilai dalam kebijakan publik dengan tujuan untuk memfasilitasi G20 solusi kebijakan berbasis bukti dan berpusat pada manusia, yang berkontribusi untuk mengatasi tantangan global.

Aktivitas V20 berpusat pada tiga task forces yakni integritas, solidaritas, dan berbagi. Komunitas global V20 telah menghasilkan kebijakan dan rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Negara-Kepala Negara G20.

D. Informasi Mengenai Rangkaian Voice of Integrity

Rangkaian Voice of Integrity 2021 terdiri dari:

- 5 Seri Webinar Road to Integrity
- Forum Voice of Integrity yang terdiri dari 5 panel

D.1 Webinar Series

Webinar Vol 1: Main Game Antikorupsi Online, Rabu, 1 Desember 2022

Panelis

Endah Winarsih
Pengajar di Mawar Sharon Christian School
Peserta Program Guru Pembangun Peradaban

Slamet
Kepala Sekolah
SDN Menteng 01 Jakarta Pusat
Peserta Program Organisasi
Penggerak KEMENDIKBUD RISTEK

Jasmin Jasin
Kepala Sekolah Gemala Ananda

Elen Nugroho
Koordinator Nasional Perkumpulan
Homeschooling Indonesia
Agen SPAK Semarang

Webinar Vol 2: Korupsi dan Difabel, Jumat, 3 Desember 2021

Panelis

Puji Lestari
Agen SPAK Gunung Kidul
Ketua Mitra Ananda
Perwakilan Perempuan
Anggota Badan Permusyawaratan
Kelurahan Rejosari

Blindman Jack
Stand Up Comedian
Aktivis Pergerakan Disabilitas

Joni Yulianto
Dewan Pengurus SIGAB

Webinar Vol 3: Integrity In Action, Minggu, 5 Desember 2021

Panelis

Rizki Utami
Lead Business Operations Klobility

Suryani Asikin
CEO Pantarei

Keenan Pearce
Founder Stoik Trisula

Webinar Vol 4: Anak Muda Pendukung Pemerintah Bersih, Rabu, 8 Desember 2021

Panelis

Irma Sari
Komite Anak Muda
Pemantau Pengadaan Barang
dan Jasa (PBJ) Aceh

Emil Dardak
Wakil Gubernur
Provinsi Jawa Timur

Idris Ahmad
Ketua Fraksi PSI
DPRD DKI Jakarta

Yosi Mokalu
Ketua Umum Siberkreasi

Nugroho A.Hadi
Tim Ahli Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Barat

Webinar Vol 5: Lingkungan Dikorupsi, Jumat, 10 Desember 2021

Panelis

Cindy J. Simangunsong
Policy & Advocacy Manager
Yayasan Econusa

Chitra Subiyakto
Pendiri dan Direktur Kreatif
Sejauh Mata Memandang

Dicky Senda
Founder Lakoat Kujawas

Sekar Banjaran Aji
Forest Campaigner
Greenpeace Indonesia

D.2. Konferensi Voice of Integrity: Nothing but Integrity 15 Desember 2021

Dibuka oleh:

Dr. Edi Prio Pambudi, S.E., M.A.
Co-Sherpa G20 Indonesia dan Koordinator Harian I Bidang Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia 2022

Craig Ewers
Team Leader AIPJ2

Maria Kresentia
Direktur SPAK Indonesia

Pada panel utama, sekaligus pembukaan konferensi Voice of Integrity, Panelis yang mengisi diantaranya:

Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi

Dr. Chatarina Muliana
Inspektorat Jenderal Kemdikbud Ristek

Alissa Wahid
Sherpa V20

Diah Saminarsih
Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)

Salman Subakat
CEO PT.Paragon

Masuk pada sesi kedua, forum dibagi menjadi 5 (lima) panel besar dengan topik pembahasan yang berbeda, diantaranya:

Panel 1: Pengarusutamaan Antikorupsi dalam Aktivisme Anak Muda

Moderator

Yuyuk Andriati Iskak
Plt. Kabiro Humas KPK

Panelis

Dharmaji Suradika
CEO Pemimpin.id

Anna Pratiwi
Wings Of Bangtan BTS ARMY

Budhi Dharma
Founder 10 pemuda

Firdza Radiany
Founder Pandemitalk

Panel 2: Anak Muda & Desa Jujur

Moderator

Nisa Zonzoa
Indonesian Corruption Watch (ICW)

Panelis

Wahyudi
Kepala Desa Panggungharjo

Wasingatu Zakiyah
Pegiat Anti Politik Uang

Andi Wahyuli
Kepala Desa Malari, Bone Sulawesi Selatan

M. Fachri, S.STP., M.SI
Kementerian Desa Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi

Panel 3: Seni & Antikorupsi

Moderator

Scholastika Gerintya

Panelis

Tommy F Awuy
Aktivis Seni

Syahdan Husein
Gejayan Memanggil

Aicha G Rebecca
Koalisi Seni Indonesia

Andi Panca Kurniawan
Watchdoc

Panel 4: Demokrasi & Antikorupsi

Moderator

Korneles Materay
Bung Hatta Anti-Corruption Award

Panelis

Muhammad Isnur
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Anita Wahid
Public Virtue Institute

Fahmi Salam
Project Multatuli

Hermien Kleiden
Wartawan

Panel 5: Korupsi dan Kejahatan terhadap Perempuan

Moderator

Ira Hussain
SPAK Makassar

Panelis

Yudha Yunus
Peneliti Korupsi dalam TPPO & Perkawinan Anak Institute Community for Justice (ICJ) Makassar

Nurul Qoiriah
Asean Act

Paul Sinlaelo
Pusat Informasi Advokasi Rakyat (PIAR) NTT

Judhi Kristantini
Australia Indonesia Partnership for Justice 2

Keseluruhan rangkaian acara Voice Integrity dihadiri oleh beragam perwakilan institusi dan/atau satuan kerja dari berbagai unsur pemangku kepentingan sebagai berikut:

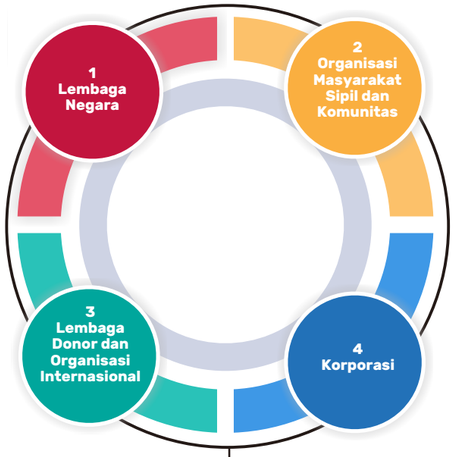

1

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- Komisi Pemberantasan Korupsi
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi
- Dewan Perwakilan Daerah Jakarta
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Pemerintah Desa Malari, Bone Sulawesi Selatan
- Pemerintah Desa Panggungharjo, Jawa Tengah

2

- SIGAB
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- Indonesia Corruption Watch
- Transparency International Indonesia
- Green Peace Indonesia
- ICEL
- Watchdog
- Public Virtue Institute
- Project Multatuli
- Asean Act
- PIAR NTT
- Indica Foundation
- Gerakan Politik Anti Uang
- Organisasi Penggerak Kemendikbud Ristek
- Sekolah Gemala Ananda
- Pusat Perhimpunan Homeschooling Indonesia
- Komite Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa Kota Banda Aceh
- Lakoatkujawas
- Wings of Bangtan
- Pemimpin.id
- 10 pemuda
- Pandemictalk
- Gejayan Memanggil
- Koalisi Seni Indonesia

3

- Australian Indonesia Partnership for Justice II/AIPJ II
- World Health Organization

4

- Daya Dimensi Indonesia (DDI)
- PANTERAI
- Stoik Trisula
- Siberkreasi
- Econusa
- Sejauh Mata Memandang
- Paragon Technology and Innovation

BAGIAN II
ANTIKORUPSI DAN PENDIDIKAN NILAI-NILAI INTEGRITAS

BAGIAN II

ANTIKORUPSI DAN PENDIDIKAN NILAI-NILAI INTEGRITAS

CAPAIAN

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Riset dan Teknologi) pada bulan Maret 2020 yang lalu telah meluncurkan program 'Merdeka Belajar' yaitu suatu program perubahan sistem pendidikan dimana landasan utamanya adalah integritas. Sampai dengan saat ini terdapat 14 pokok perubahan yang dilakukan dalam Merdeka Belajar yaitu: 1 Asesmen Nasional, USBN, RPP dan PPDB, 2) Kampus Merdeka, 3) Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS, 4) Program Organisasi Penggerak, 5) Guru Penggerak, 6) Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi, 7) Program Sekolah Penggerak, 8) SMK Pusat Keunggulan, 9) KIP Kuliah Merdeka, 10) Perluasan Program Beasiswa LPDP, 11) Kampus Merdeka Vokasi, 12) Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPLah, 13) Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana, 14) Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual.[2]
2. Program Merdeka Belajar terkait dengan penerapan prinsip integritas di sektor pendidikan, antara lain:

Mekanisme pelaporan penggunaan dana BOS secara daring (transparansi) dimana meningkat dari 60% menjadi 90%.
SIPLAH (Sistem Pengadaan Alat Sekolah) yaitu *platform* bagi *marketplace* yang mendigitalisasi proses pengadaan alat kebutuhan sekolah untuk menghindari penyalahgunaan anggaran.
Peraturan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi tentang Pencegahan Kekerasan Seksual
Sistem *Whistle Blowing* (*WBS*) untuk korupsi yang terhubung dengan KPK
Pembangunan sistem WBS untuk kekerasan perempuan dan terhubung dengan LPSK
Perencanaan pegawai yang berbeda dari perencanaan PNS pada umumnya, sehingga bisa merekrut anak muda di tingkat pimpinan.

[2] Lihat http://merdekabelajar.kemdikbud.go.id diakses pada 10 Januari 2022.

[3] Gerakan ini bermula dari keputusan Wali Kota Surabaya saat itu, Ibu Tri Rismaharini, untuk memberlakukan kurikulum antikorupsi di kota Surabaya. *Laporan Kegiatan GPP Surabaya. SPAK Indonesia. 2020*

3. Sementara itu dari sisi komunitas, pada tanggal 22 April 20214, KPK bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) meluncurkan Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang menempatkan perempuan sebagai pemegang peranan penting dalam pencegahan korupsi khususnya pendidikan nilai-nilai anti korupsi. Sampai dengan tahun 2022 Gerakan ini telah melakukan pelatihan kepada 3000 orang, dan memiliki agen lebih dari 3000 orang di 34 provinsi di Indonesia

   Khusus pada sektor Pendidikan, SPAK Indonesia telah meluncurkan gerakan Guru Pembangun Peradaban (GPP) tanggal 5 Desember 2019, program yang terwujud sebagai hasil kerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya dan beberapa perusahaan swasta. Dalam Gerakan ini SPAK Indonesia melatih 350 guru dan kepala sekolah SD dan SMP di Kota Surabaya.[3] Selanjutnya di tahun 2021 melalui Program Organisasi Penggerak dari Kemendikbud Ristek Dikti, SPAK Indonesia melatih 15 guru dan kepala sekolah di DKI Jakarta dan 15 guru dan kepala sekolah di Kota Makassar.

   Program Organisasi Penggerak dari Kemendikbud Ristek Dikti, SPAK Indonesia melatih 15 guru dan kepala sekolah di DKI Jakarta dan 15 guru dan kepala sekolah di Kota Makassar.

   SPAK Indonesia sudah mengembangkan tools pendidikan anti korupsi dalam bentuk *board games* antara lain Arisan, Majo, PutputLK untuk dewasa, Semai untuk anak TK dan SD, Majo Yunior untuk anak SMP dan SMA, Trata untuk mengawal Dana Desa dan Sidaka untuk mencegah korupsi dalam perkawinan anak dimana sudah disebarkan pada masyarakat dari berbagai kalangan.
4. Pada tahun 2021 juga diluncurkan Gerakan INTEGRITYTALK.ID yang diinisiasi oleh SPAK Indonesia dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2). Gerakan ini merupakan wadah anak-anak muda yang ingin berperan dalam pemberantasan korupsi dengan berlandaskan pada kesadaran akan pentingnya nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesadaran ini mereka dapat melakukan perubahan dimulai dari diri sendiri, dan selanjutnya pada lingkungan yang lebih luas.

   Saat ini INTEGRITYTALK.ID sudah menyelenggarakan beberapa forum diskusi terbuka yang pada prinsipnya bertujuan untuk membangun kolaborasi dengan berbagai organisasi dan komunitas dalam upaya menjadikan antikorupsi sebagai isu arus utama. Salah satu wadah kolaborasi ini adalah K-HUB (Knowledge Hub), yaitu platform daring untuk berbagi dan belajar tentang isu-isu antikorupsi bagi semua kalangan yang peduli pada pemberantasan korupsi. Dalam wadah ini para anggota dapat memperoleh berbagai informasi berupa tulisan-tulisan jurnalistik, publikasi akademis dan berbagai artikel tentang korupsi dan inisiatif antikorupsi yang dipublikasi melalui website KHubforjustice.org.

[3] Gerakan ini bermula dari keputusan Wali Kota Surabaya saat itu, Ibu Tri Rismaharini, untuk memberlakukan kurikulum antikorupsi di kota Surabaya. *Laporan Kegiatan GPP Surabaya. SPAK Indonesia. 2020*

5. Pendidikan nilai-nilai integritas pada prinsipnya sangat penting dalam pencegahan korupsi, mengingat definisi dari integritas sendiri adalah antitesis dari korupsi, yaitu berperilaku jujur, adil dan menerapkan nilai-nilai moral secara teguh dan konsisten.[4] Berangkat dari niat untuk memahami nilai-nilai luhur yang penting dalam membangun Indonesia ke arah yang lebih baik bersama-sama, Bappenas RI dan Dayalima Abisatya melakukan survey (Nenilai) untuk memetakan nilai-nilai kini Indonesia dengan menggunakan Barrett Value Model.[5]

   Upaya ini sejalan dengan prinsip SPAK Indonesia dan *Value 20* (*V20)* yaitu komunitas informal berisikan para pakar dan praktisi dari seluruh dunia yang bertujuan untuk mendukung G20 dalam mengeluarkan kebijakan publik yang berbasis nilai-nilai luhur. Anggota V20 melakukan advokasi kepada G20 dan komunitas global tentang dampak positif dari solusi kebijakan publik berbasis bukti dan fokus pada manusia yang berlandaskan nilai.[6]

[4] *Lihat definisi integrity* dalam https://www.merriam-webster.com/dictionary/integrity. Sementara KPK mendefinisikan Integritas dalam Kamus Kompetensi Perilaku KPK diartikan sebagai bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi), diambil dari https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/pengertian-integritas diakses pada 8 Januari 2022.

[5] Nenilai melakukan survey pada bulan Juli-Desember 2020 terhadap 50.452 responden di seluruh Indonesia dari berbagai latar belakang. Sekitar 39.053 responden adalah responden milenial. Metodologi Barret ini merumuskan 7 Jenjang Kesadaran yang dimulai dari tingkat terendah, yaitu kelangsungan hidup (*survival*), diikuti tingkat kedua berupa hubungan (*relationship*), lalu penghargaan diri (*self-esteem*), transformasi (*transformation*), menemukan jati diri *(internal cohesion*), memberi sumbangsih (*making a difference*), dan berdarmabakti (*service*).

[6] Lihat https://values20.org

TANTANGAN

- Tantangan terbesar saat ini adalah pada internalisasi dan penerapan nilai-nilai integritas secara konsisten dalam berbagai sisi kehidupan (dalam keluarga, lingkungan sekitar, di dunia kerja, dsb).
- Bagaimana menerapkan integritas, tidak terbatas pada ruang publik dimana ada orang lain yang mengawasi, namun juga ketika kita sendiri apakah kita masih memegang nilai-nilai yang didasari oleh kebaikan tersebut. Bagaimana membangun keberanian untuk mempertahankan integritas ketika berada di lingkungan atau situasi dimana orang lain tidak menerapkannya.[7]
- Minimnya *role model* yang mencerminkan pikiran, ucapan dan perilaku yang berintegritas (*walk the talk)*, memengaruhi bagaimana nilai integritas tumbuh dengan luas di masyarakat dan dapat dilihat secara nyata penerapan dan dampaknya.

[7] Survey Nenilai misalnya menunjukkan bahwa nilai integritas pada tahun 2020 masih merupakan nilai budaya bangsa yang belum terwujud dan diharapkan terwujud di masa depan. Kelompok responden dari kalangan milenial misalnya hanya menyebutkan 3 nilai-nilai luhur yang dimiliki dan diterapkan, sementara 7 Nilai lainnya masih perlu ditingkatkan.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

- Bangsa Indonesia diharapkan memperkuat nilai-nilai Pancasila dimana nilai integritas ada di dalamnya.
- Kita harus mampu memastikan nilai integritas ada saat mengembangkan program di semua organisasi pada sektor apapun.
- Perlu ada perubahan perilaku di tingkat masyarakat, kebijakan publik dan gerakan masyarakat sipil
- Perlunya memperluas ruang transparansi terutama pada pejabat publik dan politisi (misalnya melalui media sosial, dsb) sehingga mereka tidak hanya dapat menyebarkan gagasan dan pemikirannya, namun juga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kinerja mereka dan menilai integritasnya.
- Perlunya kolaborasi untuk menguatkan komitmen dalam menghentikan kebiasaan-kebiasaan koruptif.
- Perlu ada *youth champion* yang dapat mewakili kelompoknya untuk bisa menerima dan menerapkan nilai-nilai luhur yang mudah dipahami dan diterima kelompoknya
- Perlunya memperbanyak *role model* integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Inisiatif dan kolaborasi yang dilakukan oleh SPAK Indonesia, V20 dan INTEGRITYTALK.ID melalui berbagai kegiatan harus dipastikan dapat memperluas penyebaran nilai-nilai luhur termasuk nilai integritas sehingga nilai-nilai tersebut menjadi hidup sebagai nilai pribadi dan nilai budaya bangsa.
- Perlu memastikan penerapan nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan dan kebijakan negara.
- Memperkuat perspektif masyarakat dan lembaga negara agar pembangunan tidak hanya difokuskan pada peningkatan ekonomi saja namun juga keadilan sosial dan kehidupan bersama yang lebih baik.

BAGIAN III
ANTIKORUPSI, ANAK MUDA DAN PEMERINTAHAN

BAGIAN III
ANTIKORUPSI, ANAK MUDA DAN PEMERINTAHAN

CAPAIAN

1. Upaya pencegahan korupsi di desa penting dilakukan mengingat desa adalah bentuk pemerintahan terkecil. Kelompok muda di tingkat lokal juga mulai aktif memantau proses politik yang terjadi di lingkungannya seperti Gerakan Desa Anti Politik Uang. Gerakan yang dilakukan di Desa Sardonoharjo, Sleman misalnya diawali keprihatinan warga desa akan maraknya politik uang. Setiap ada pemilihan kepala daerah (Pilkada), hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pilleg) di Desa maka warga desa terbiasa dengan politik uang dimana tidak hanya berupa iming-iming imbalan (pasif) namun juga telah mulai bersifat transaksional (aktif) dimana warga meminta suatu imbalan jika memilih calon tertentu.
2. Program Desa Antikorupsi di Desa Sardonoharjo, Sleman digagas oleh perempuan dan kelompok muda desa. Mengapa dua kelompok ini penting, karena ruang sosial perempuan banyak namun tidak mampu menjadi penopang dalam meraup suara secara elektoral. Kelompok muda juga selalu disasar para calon di saat pemilu termasuk di tingkat desa. Sayangnya setelah pesta politik selesai, kelompok muda sering tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, keterwakilan hanya dilihat dari persentase jumlah calon kepala daerah/legislatif/pemerintah desa yang muda, namun tidak berdampak signifikan pada proses politik di pemerintahan.
3. Warga Desa Sardonoharjo mengawali kegiatan Desa Anti Politik Uang ini dengan membuat kesepakatan bersama komponen desa (pemerintah desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, kelompok muda, dsb), mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan. Kesepakatan bersama ini kemudian dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Desa APU dengan melibatkan ormas berbasis umum, berbasis agama, LSM dan kampus.
4. Rakor ini selanjutnya menetapkan rencana pembuatan regulasi (Perkades) yang pada intinya mencanangkan program anti politik uang sebagai program desa dan menetapkan suatu tim desa (beranggotakan warga desa khususnya kelompok perempuan, pemuda dan kelompok agama) yang akan melaksanakan kegiatan anti politik uang. Kegiatan yang dilakukan antara lain sosialisasi, forum strategis, deklarasi anti politik uang dan kampanye kepada seluruh warga desa. Tim desa juga melakukan advokasi pada KPU dan Bawaslu mengenai peraturan teknis terkait praktik politik uang yang muncul di lapangan namun belum diatur, panduan pemantauan warga pada saat hari H dan pasca pencoblosan/pemilihan.
5. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sudah pernah mencanangkan program Desa Anti Politik Uang (APU) sejak tahun 2019 yang dimulai oleh Bawaslu pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).[8] Program dari BAWASLU ini sejalan dengan hasil kajian KPK yang menunjukkan bahwa biaya politik tinggi merupakan salah satu penyebab mengapa banyak kepala daerah yang kemudian melakukan korupsi setelah menang pemilu.[9]
6. Pemerintah Desa tidak ketinggalan berupaya membangun ekosistem antikorupsi di daerahnya. Kepala Desa Mallari yang seorang perempuan misalnya sejak bergabung dengan Gerakan SPAK pada tahun 2018 mencoba mewujudkan program Desa Jujur dengan melakukan transparansi anggaran dimana masyarakat (khususnya kelompok perempuan dan muda) dilibatkan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan anggaran desa.[10]
7. Lebih lanjut, Pemerintah Desa Mallari juga aktif melakukan pendidikan antikorupsi ke sekolah-sekolah mulai tingkat SD hingga SMA dengan menggunakan game yang interaktif dan melibatkan agen SPAK yang ada di desa. Poster-poster tentang nilai-nilai antikorupsi dipasang di berbagai tempat umum. Saat ini Pemerintah Desa juga berpartisipasi dalam program desa peduli pemilu yang mengkampanyekan anti politik uang pada pemilihan desa. Program ini juga memberdayakan kelompok muda, difabel dan perempuan.
8. Dari 11 lembaga desa yang ada di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta (minus lembaga desa berbasis perempuan dan teknokratis), dikelola oleh pemuda. Pemuda yang punya ketertarikan dan keahlian dalam teknologi digital, ikut membantu lembaga pengelola sistem informasi desa. Mereka yang paham hukum bergabung di lembaga mediasi desa untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang biasa dihadapi warga. Anak muda yang punya ketertarikan di bisnis atau kewirausahaan bergabung di BUMDes, dsb. Langkah ini dilakukan selain sebagai sarana partisipasi anak muda dalam pemerintahan desa namun juga Langkah membangun sistem kaderisasi.
9. Pelibatan kelompok muda hanya salah satu dari berbagai program yang dilakukan pemerintah desa untuk menjadi Desa Antikorupsi. Pemerintah Desa melakukan program penguatan tata laksana diantaranya mencakup pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, membangun kultur organisasi yang berintegritas dan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa yang efektif, serta membangun budaya anti korupsi dalam berbagai sistem (co: sistem pengadaan barang jasa, sistem penerimaan hadiah, suap dan konflik kepentingan).[11]
10. Pemanfaatan teknologi dan media sosial ditemukan juga pada pemerintah daerah tingkat provinsi seperti Jawa Timur yang aktif melakukan pemutakhiran informasi Informasi yang lebih rinci disediakan di website resmi pemerintah daerah.

---

[8] Agus Riwanto, Achmad*, Suranto, Sunny Ummul Firdaus, Sri Wahyuni, "Membangun Model Desa Anti Politik Uang sebagai Strategi BAWASLU Dalam Mencegah Pilkada Curang", *Masalah-masalah Hukum Vo.50 ed 3* (2021), hlm. 286. Sampai dengan tahun 2020, setidaknya sudah 5 Kabupaten/Kota dengan 34 desa di DI Yogyakarta yang sudah mencanangkan program Desa Anti Politik Uang (Data Bawaslu DI Yogyakarta seperti dikutip oleh MET. Pahlevi, "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa", *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6(1), 2020. hlm 146.*

[9] Wasingatu Zakiyah (inisiator Desa Anti Politik Uang Sardonoharjo, Sleman), "Desa Jujur Desa Anti Politik Uang" dipaparkan pada Webinar Seri IV Road to Voice of Integrity, "Anak Muda Pendukung Pemerintah Bersih", pada 8 Desember 2013. KPK mencatat bahwa sekitar 80% biaya pilkada para calon diperoleh dari dana sponsor dan bukan dana pribadi masing-masing calon.

[10] Pemerintah desa juga memasang baliho transparansi anggaran di kantor desa dan tempat umum, memasang papan kegiatan dalam setiap pembangunan yang berasal dari Dana Desa/DD (APBN), Alokasi Dana Desa/ADD (APBD) dan sumber lainnya, komitmen perangkat desa untuk jujur dan bertanggung jawab serta membentuk BUMDes Mart Jujur. A. Wahyuli, "Mewujudkan Desa Jujur", dipaparkan pada Webinar Konferensi Virtual Voice of Integrity 2021, Panel V: Anak Muda dan Desa Jujur, tanggal 15 Desember 2021.

[11] Wahyudi (Lurah Desa Panggungharjo, Bantul, DI Yogyakarta), "Panggungharjo Desa Bagi Semua Warga Bangsa: Untuk Hidup yang Patut, Layak dan Bermartabat", 2021, dipaparkan pada Webinar Konferensi Virtual Voice of Integrity 2021, Panel V: Anak Muda dan Desa Jujur. tanggal 15 Desember 2021.

melalui website atau bahkan media sosial.[12] Informasi bersifat umum dibuat dalam bentuk infografis, video dan media interaktif lainnya disebarkan dalam media sosial. Informasi yang lebih rinci disediakan di website resmi pemerintah daerah.

11. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat ini juga mendorong "Desa Jujur" dan penerapan integritas di tingkat desa. Beberapa strategi yang diterapkan fokus pada penajaman arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dan refocusing arah pembangunan desa kepada agenda Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's Desa) yang intinya memberdayakan kapasitas dan SDM desa demi kesejahteraan desa itu sendiri.[13] Salah satu bentuk perwujudan dari program tersebut misalnya digitalisasi desa yang mendorong transparansi pemerintah desa dimana warga desa dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan.

12. Rekrutmen SDM pemerintahan seperti ASN juga dapat menjadi sarana menjaring calon ASN yang berintegritas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat misalnya mencanangkan 3 kriteria ASN yaitu integritas, profesional dan melayani masyarakat. Untuk menghindari praktek jual beli dan KKN maka Proses seleksi dilakukan dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT). Materi antikorupsi juga diberikan pada pelatihan CPNS. Program pengembangan SDM dilakukan dengan sistem merit dan berbasis sistem informasi.[14] Pemprov juga bekerjasama dengan Korsupgah KPK untuk mencapai 8 area prioritas perubahan sesuai panduan *Monitoring Corruption Prevention* (MCP) dari KPK, Sistem *Whistleblowing* dan peningkatan fungsi pengawasan internal.

13. Salah satu bentuk keterlibatan anak muda dalam pemerintahan adalah melalui partai politik. Apabila dijalankan dengan baik politik adalah jalan memperbaiki, mengakselerasi perubahan bahkan melipatgandakan manfaat.[15] Faktor penting untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menciptakan keuangan partai politik yang sehat dan partisipatif agar dapat memutus rantai korupsi. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sejak berdiri misalnya melakukan berbagai strategi untuk mendorong integritas mulai dari pelaporan keuangan dan kegiatan partai, kewajiban pelaporan harta kekayaannya (LHKPN), regulasi dan pengawasan kinerja kader partai secara berkala via website dan aplikasi.[16] PSI juga membuat kaderisasi anak muda melalui program magang di partai politik.

[12] Akun media sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur (IG dan twitter @jatimpemprov) misalnya sudah diikuti oleh lebih dari 220.000 dan 60.000 orang. Khusus untuk informasi Covid-19 Pemprov menyediakan https://infocovid19.jatimprov.go.id yang menyediakan peta sebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Timur.

[13] Program tersebut antara lain adalah: 1) Mengarusutamakan pembangunan desa berkelanjutan (SDGS Desa), 2) peningkatan konektivitas intra dan antar pedesaan, 3) Peningkatan kapasitas sistem kelembagaan, dan SDM pedesaan yang unggul 4) Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan, 5) Pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital, 6) Peningkatan keberlanjutan pembangunan pedesaan berwawasan lingkungan, 7) Peningkatan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan, 8) Peningkatan sinergitas dan kolaborasi pembangunan perdesaan. Sesuai paparan M. Fachri (Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, "Implementasi Desa Jujur dalam Pencapaian SDG's Desa", dipaparkan pada Webinar Konferensi Virtual Voice of Integrity 2021, Panel V: Anak Muda dan Desa Jujur. tanggal 15 Desember 2021.

[14] Program ini dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi. Sesuai paparan Nugroho Atma Hadi (Tim Ahli Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat) pada Webinar *Road to Voice of Integrity*: Anak Muda Pendukung Pemerintah Bersih pada 8 Desember 2021.

[15] Idris Ahmad (Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, DPRD DKI Jakarta), "Anak Muda Pendukung Pemerintah Bersih", dipaparkan pada Webinar *Road to Voice of Integrity*: Anak Muda Pendukung Pemerintah Bersih pada 8 Desember 2021.

[16] https://psi.id

14. Saat ini gerakan untuk mendorong pemimpin muda yang berkualitas diantaranya didorong oleh LSM bernama pemimpin.id.[17] Melalui berbagai kegiatan pendidikan, sosialisasi dan pembangunan komunitas, pemimpin.id berupaya membangun ekosistem kepemimpinan Indonesia yang inklusif, efektif dan memberdayakan.[18] Komunitas pemuda lain seperti http://10pemuda.or.id/ misalnya didirikan untuk mengembangkan gerakan kepemudaan yang diinisiasi Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI berbasis *active citizenship*.[19] Prinsipnya adalah pemuda dapat Target utama dari komunitas ini adalah pelajar SMA karena merekalah yang akan berperan pada tahun 2045 karena jumlah mereka sekitar 330 juta.[20]

15. Sementara itu komunitas @PandemicTalks giat melakukan pendidikan mengenai pandemi di Instagram dan Twitter. Komunitas yang digagas anak muda ini sekarang telah memiliki follower di IG sebanyak 397.000. @PandemicTalks menyebarluaskan informasi yang benar mengenai Covid-19 dengan Bahasa yang mudah dipahami masyarakat awam dan mendorong masyarakat khususnya anak muda untuk mengandalkan ilmu pengetahuan alam dan sosial ketika berhadapan dengan isu Covid-19, Kesehatan dan perubahan iklim.[21] Beberapa isu korupsi juga sempat diangkat oleh @PandemicTalks misalnya mengenai perbedaan data Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah, realisasi anggaran penanganan Covid-19 yang minim serta beberapa penyelewengan yang terjadi baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri.

16. Komunitas ARMY Indonesia (Wings of Bangtan) adalah komunitas para penggemar Kpop Band bernama BTS. Komunitas ini berupaya untuk menyebarkan suara anak muda ke masyarakat umum khususnya di isu *anti bullying* dan perlindungan anak. Kegiatan ARMY Indonesia sendiri saat ini fokus pada kegiatan sosial kemanusiaan seperti donasi pada Yayasan, pemulung, tenaga medis, vaksinasi gratis untuk masyarakat dan swab gratis untuk driver ojek online hingga penanaman pohon di Desa yang mengalami kekeringan. Sebagai bentuk integritas dan transparansi, ARMY Indonesia (Wings of Bangtan) dalam mengerjakan kegiatan dan melaporkan donasi yang diterima dan mempublikasikannya di berbagai media sosial.

[17] https://pemimpin.id adalah LSM yang didirikan tahun 2019 ini fokus pada kegiatan antara lain acara atau pelatihan kepemimpinan, Menyebarluaskan edukasi kepemimpinan melalui media online terutama di website dan sosial media dan membangun komunitas binaan dari para peserta kegiatan. Saat ini pemimpin.id sudah memiliki 457 rekan komunitas dan 1954 alumni program dengan 81 gagasan terkumpul. LSM ini juga memiliki program ASN Academy yang berupaya untuk mengajarkan *problem solving, critical thinking, design thinking* dsb untuk membekali para ASN muda dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Forum ini juga digunakan untuk saling menguatkan antar peserta karena memiliki nilai idealisme yang sama yang mungkin tidak mendapatkan dukungan di lembaga asalnya.

[18] Inklusif artinya pemimpin yang tidak memikirkan hanya dirinya atau golongannya tapi memikirkan kepentingan bersama. Efektif artinya pemimpin dapat menyelesaikan masalah tidak hanya sekedar pendapat/komentar namun berpikir solusinya dan menjalankan solusi tersebut sekecil apapun secara sistematis hingga akhirnya perubahan itu akan terus bergulir. Memberdayakan artinya pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyatnya, kepentingan timnya, kepentingan kelompoknya, kepentingan rakyat di sekitarnya agar masyarakatnya dapat berubah menjadi lebih baik.

[19] Kegiatan yang dilakukan antara lain pelatihan, pengembangan komunitas hingga Festival Gelora Muda setiap tanggal 28 Oktober.

[20] Sesuai paparan Budi Dharma (10Pemuda) dalam Webinar Konferensi Virtual Voice of Integrity 2021, Panel 1: Pengarusutamaan Antikorupsi dalam Aktivisme Anak Muda, tanggal 15 Desember 2021.

[21] Firdza Radiany (@PandemicTalks), "Pandemi/Wabah Tidak hanya Covid-19 namun juga Korupsi", paparan dalam Webinar Konferensi Virtual Voice of Integrity 2021, Panel 1: Pengarusutamaan Antikorupsi dalam Aktivisme Anak Muda, tanggal 15 Desember 2021.

17. Anak muda juga sudah aktif melakukan kegiatan pemantauan kinerja pemerintah dan melakukan analisa berbasis data untuk merespons keterbukaan informasi yang mulai dilakukan oleh pemerintah.[23] Program pemantauan ini umumnya dilakukan oleh LSM atau organisasi masyarakat. Saat ini berkembang pula kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh anak muda untuk sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) salah satunya oleh Komite Anak Muda Pemantau PBJ di kota Banda Aceh yang dilakukan oleh 10 orang anak muda. Para pemuda ini juga diberikan pelatihan terkait isu korupsi dalam PBJ dalam bentuk Sekoah Pengawasan Pengadaan Publik (SP3). Gerakan yang dibina oleh *Transparency International Indonesia* (TII) ini dilakukan pada awal pandemi Covid-19 menyikapi berbagai kebijakan kondisi darurat yang mempengaruhi PBJ serta potensi korupsi dengan adanya kebijakan tersebut.[24] Selain di Banda Aceh, komunitas ini juga ada di Kupang dan Jember.

---

[22] Kegiatan pemantauan dilakukan anak muda sejak reformasi dimulai antara lain melalui pemantauan pemilu tahun 1997 dan berlanjut sampai sekarang (Lihat https://rumahpemilu.org/sejarah-pemantau-pemilu-indonesia/). Pemantauan juga dilakukan terhadap jalannya persidangan yang dimulai oleh ICW dalam kasus korupsi, ELSAM dalam kasus HAM dan dan MaPPI FHUI dalam penerapan hukum acara di persidangan. Pemantauan masyarakat terhadap isu bersifat sektoral juga dilakukan misalnya oleh TII terhadap penggunaan anggaran pendidikan di sekolah atau isu perizinan di sektor kehutanan yang dilakukan oleh WALHI, Greenpeace, Yayasan ECONUSA, dsb, serta pemantauan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh LBH APIK dan jaringannya di daerah.

[23] Paparan Irma Sari dari Komite Anak Muda Pemantau PBJ Aceh disampaikan dalam Webinar *Road to Voice of Integrity*: Anak Muda Pendukung Pemerintah Bersih pada 8 Desember 2021.

[24] Ibid. Di Kota Banda Aceh sendiri komite yang terdiri dari anak muda memantau kasus pengadaan seperti: alat prokes di sekolah (co: wastafel, pipa air tinggi, dsb) dengan harga tinggi tapi tidak sesuai sepsifikasi, kebutuhan dan kondisinya tidak digunakan oleh siswa, kasus pengadaan sapi kurus (dua kasus ini sudah masuk ke proses hukum Lihat https://www.ajnn.net/news/kasus-wastafel-di-disdik-aceh-polda-aceh-sudah-panggil-sejumlah-pihak/index.html dan https://news.detik.com/berita/d-5686800/polisi-tetapkan-9-tersangka-kasus-proyek-pengadaan-sapi-kurus-di-aceh) serta aplikasi Toko PIKA (Lihat https://www.ajnn.net/news/buat-aplikasi-pika-disperindagkop-abdya-habiskan-rp-1-3-miliar-lebih/index.html dan https://beritakini.co/news/dinilai-sedot-anggaran-besar-pelaku-industri-digital-soroti-aplikasi-pika-umkm-aceh-barat-daya-rp-1-3-miliar/index.html)

TANTANGAN

- Undang-undang Pemilu tidak secara spesifik memberikan penjelasan praktek yang terjadi di lapangan. Hal ini tentunya menyulitkan tim relawan khususnya di tingkat desa saat menemukan dugaan praktek politik uang di lapangan.
- Kebanyakan Calon legislatif tidak mengetahui perbedaan batasan tentang politik uang.
- Masyarakat secara umum belum mampu membedakan biaya politik dan politik uang. Masih banyak warga yang belum memahami dampak negatif dari politik uang pada kesejahteraan desa di masa depan.
- Beberapa tantangan dari sisi pemimpin/pejabat penyelenggara negara dalam pencegahan korupsi antara lain:
    - Perlu menumbuhkan kesadaran diri sebagai pemangku jabatan pada diri sendiri dan segenap jajarannya secara konsisten.
    - Harus mampu menolak secara halus ketika ada tawaran gratifikasi atau tindakan sejenisnya.
    - Masih ada pihak ketiga yang kurang bertanggung jawab dan selalu menawarkan imbalan untuk melakukan perilaku koruptif.
- Belum meratanya pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai antikorupsi pada warga dan perangkat desa satu dengan yang lain. Perilaku koruptif warga atau perangkat desa di desa lain dapat menular pada warga dan perangkat desa di wilayah sekitarnya atau bahkan ke desa yang antikorupsi.
- Dalam konteks transformasi sosial, tantangan itu tergantung dari karakter kepemimpinannya. Apakah pemimpin yang bersangkutan mampu mengelola perubahan dan tantangan yang timbul dari perubahan tersebut. Semua pemimpin pastinya kembali pada sumpah jabatan yang diambilnya, terutama ketika diharuskan bertindak dan berlaku adil. Dalam kondisi ini pemimpin harus lapang dada menerima kondisi dari warga desa, sejauh hal tersebut masih sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- Mayoritas konten media sosial menampilkan kesuksesan dengan cara cepat/instan tanpa mendorong adanya kerja keras. Hal ini mempengaruhi pola pikir dan nilai-nilai yang dipahami pemuda khususnya siswa SMP, SMA dan potensial mendorong perilaku yang tidak berintegritas.
- Masih minimnya pemahaman dan ketertarikan anak muda untuk aktif terlibat dalam memberikan masukan pada pengambilan kebijakan pemerintah daerah (co Musrenbang) karena dianggap sebagai kegiatan formal pemerintahan saja.
- Program pengadaan barang dan jasa sangat rentan korupsi terlebih lagi dalam kondisi darurat seperti pandemi Covid-19. Hal ini diakibatkan antara lain adanya: 1) Percepatan PBJ, 2) Lemahnya pengawasan dan 3) Infrastruktur regulasi pengadaan lemah; 3) Minim transparansi dan akuntabilitas. Kondisi yang ketiga ini menjadi tantangan bari anak muda untuk bisa memantau proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

- Tim relawan yang khusus disiapkan oleh KPU dan Bawaslu, perlu menyepakati kegiatan gabungan saat turun lapangan sehingga makin banyak pemilih yang tersesat dalam kampanye anti politik uang dan mengawasi jalannya pemilu bebas dari politik uang.
- Tim dari KPU tidak hanya perlu melakukan kampanye cara berpartisipasi di pemilu sementara Tim Bawaslu hanya bicara pelanggaran pemilu. Di lapangan, kedua tim tersebut harus dapat menyuarakan pesan yang sama serta konsisten, mengingat isu politik uang sudah mulai dideteksi pada semua tahapan persiapan hingga pasca pemilihan.
- Perlu pelatihan kepada Tim desa metode penyampaian pesan pemilu dan politik uang yang jelas kepada para pemilih dan calon.
- Kesadaran berpolitik para pemilih/masyarakat juga harus dibenahi agar mampu menilai calon dan partai politik mana yang baik dan berkinerja dan mana yang buruk (co. tidak berintegritas, kinerja minim, dsb). Pada saat yang bersamaan pembenahan juga harus dilakukan pada semua partai politik secara merata dan konsisten untuk dapat meningkatkan integritas dan kinerja secara kelembagaan maupun individual kader partai itu sendiri.
- Seorang pemimpin harus melihat resistensi terhadap perubahan sebagai bagian dari proses perubahan yang harus dikelola. Mungkin saja resistensi timbul karena gagasan perubahan yang ditawarkan belum waktunya untuk diterapkan, belum sesuai strateginya atau secara substansi belum tepat. Pada sisi yang lain, ketika seorang pemimpin mendapatkan apresiasi dari lembaga lain sebenarnya hal ini adalah penanda bahwa perubahan yang didorong berada pada arah yang tepat.
- Pemimpin desa harus mampu menciptakan rasa percaya warga desa misalnya dengan memastikan ucapan sesuai dengan perbuatan. Sebagai contoh pemimpin desa harus memastikan masukan dari warga desa dalam musyawarah desa (khususnya kelompok yang berkebutuhan khusus co: perempuan, difabel, dsb) direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.
- Pendekatan pada anak muda desa untuk mendukung anti korupsi antara lain melalui media sosial dengan medium interaktif seperti membuat video mengenai pandangan anak muda tentang korupsi, kompetisi pembuatan e-flyer dan tagline antikorupsi yang disebarkan melalui IG, FB, wa grup warga desa dsb.
- Pencegahan korupsi juga dapat dilakukan dengan melibatkan warga desa dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan desa serta memastikan pendidikan dan kesehatan warga desa terjamin. Pemerintah desa bersama warga desa harus mewujudkan nilai-nilai antikorupsi dan saling mengingatkan untuk tidak terlibat politik uang, memberikan suap dan gratifikasi pada pejabat desa, dsb.
- Harapannya semakin banyak pemimpin-pemimpin muda (dari komunitas, kampus, pejabat BEM juga para ASN muda, dsb) yang memiliki visi sama dapat berkumpul dalam satu wadah komunitas sehingga tidak merasa sendirian dan ikut mendorong terwujudnya kepemimpinan yang baik, antikorupsi dan fokus memikirkan kepentingan orang banyak.
- Pemerintah daerah harus mampu mendorong seluruh elemen masyarakat seperti elemen perempuan, difabel termasuk anak muda untuk berpartisipasi sedini mungkin dalam kegiatan pemerinta atau pengambilan kebijakan seperti Musrenbang. Partisipasi ini dapat menjadi salah satu jalan untuk mengurangi resiko atau ruang praktek-praktek korupsi di pemerintahan.
- Masyarakat khususnya anak muda perlu didorong untuk lebih aktif memberikan masukan kepada berbagai sarana informasi yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk melakukan perbaikan, pemutakhiran atau melengkapi data yang ada. Selain memperluas dan memperbanyak sarana dan ruang keterlibatan anak muda, harus dipastikan juga ada perlindungan atau ada rasa aman bagi anak muda untuk menyatakan pendapatnya secara bebas, tanpa tekanan namun bertanggung jawab.
- Anak muda yang berintegritas dan aktif dalam Partai politik, memegang jabatan di parlemen dan pemerintahan harus lebih dilibatkan dalam gerakan antikorupsi sehingga jaringan yang terbangun tidak hanya terbatas di masyarakat, ormas atau LSM saja namun berbagai elemen masyarakat. Mengingat praktek korupsi sendiri sangat kompleks dan melibatkan banyak orang di berbagai elemen masyarakat.
- Strategi ini juga harus diikuti dengan menambah lebih banyak anak muda yang berintegritas dan anti korupsi untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan dan partai politik.

BAGIAN IV
ANTIKORUPSI DAN DIFABEL

BAGIAN IV
ANTIKORUPSI DAN DIFABEL

CAPAIAN

1. Pada tahun 2014, tujuh (7) organisasi disabilitas (Bandung Independent Living Center/Bilic, PPDI Nusa Tenggara Barat (NTB), LK3AD NTB, HWDI Makassar dan Lombok Tengah, SAPDA Yogyakarta, serta Yayasan Mitra Jakarta) mendatangi KPK untuk melaporkan adanya dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan pemerintah. Korupsi tersebut antara lain pemotongan dana bantuan bagi disabilitas yang tidak mampu bekerja.[25]
2. Upaya ini menunjukkan bahwa sudah mulai ada kesadaran pada kelompok difabel/disabilitas korupsi dan perilaku koruptif serta pentingnya kelompok disabilitas untuk mencegah praktik-praktik korupsi khususnya di wilayah sekitarnya.
3. SAPDA Yogyakarta bersama Agen SPAK Gunung Kidul pada tahun 2017 mulai melakukan Pendidikan anti korupsi kepada sekitar 10 kelompok disabilitas desa dimana di dalamnya ada 2 kelompok rentan khususnya lansia (ada 20 kelompok disabilitas desa dari 144 desa yang ada), terutama mengenai pelayanan pemerintah desa.

   Setelah dilakukan Pendidikan anti korupsi dan pendampingan, terjadi perubahan pada warga desa dimana mereka mulai memahami hak-haknya dan berani menyampaikan aspirasi/kebutuhannya pada pemerintah desa, termasuk dalam Musrenbangdes atau bahkan demonstrasi jika ada penyimpangan atau perilaku koruptif lainnya.

   Terjadi juga perubahan dalam kualitas layanan pemerintah desa, seperti waktu kerja kantor desa tepat waktu, transparansi informasi mengenai program-program pemdes seperti pelatihan warga, hilangnya praktik pungli dan gratifikasi dalam pembuatan KTP dan dokumen administrasi lainnya.

   Saat ini jumlah anggota kelompok disabilitas desa makin bertambah, dari awalnya 10-15 orang menjadi 24-40 orang per kelompok desa di bawah Pusat Pemberdayaan Disabilitas Mitra Sejahtera dan kelompok Mitra Ananda.
4. Saat ini sudah terbentuk Komisi Nasional Disabilitas berdasarkan Peraturan Presiden No 68 Tahun 2020 yang bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Komisi ini dalam pelaksanaan tugasnya harus mengarusutamakan isu disabilitas ke berbagai sektor layanan pemerintah, termasuk mengenai potensi korupsi yang mungkin timbul.

[25] https://nasional.kompas.com/read/2014/06/10/1823538/KPK.Kaget.Terima.Laporan.Korupsi.Dana.Fasilitas.untuk.Disabili

TANTANGAN

- Pemahaman kelompok difabel akan hak-haknya dan bentuk-bentuk perilaku koruptif serta korupsi belum merata sehingga masih banyak yang menjadi korban namun juga tanpa disadari menjadi pelaku dengan berpartisipasi dalam praktek koruptif itu sendiri.
- Belum semua organisasi difabel memiliki SOP dan mekanisme pengelolaan keuangan yang transparan sehingga dapat mengurangi potensi resiko korupsi dan pencucian uang.
- Masih banyak ditemukan tekanan pada kelompok difabel serta minimnya perlindungan atas laporan dugaan penyimpangan/korupsi. Hal ini mempengaruhi keberanian dalam melanjutkan proses pengaduan.
- Akses, partisipasi dan kontrol kelompok difabel dalam memperoleh bantuan baik dari pemerintah maupun dari donatur privat masih terbatas

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

- Bangsa Indonesia diharapkan memperkuat nilai-nilai Pancasila dimana nilai integritas ada di dalamnya.
- Perlu adanya pendidikan yang lebih luas dan merata di kalangan kelompok difabel mengenai hak-hak warga negara dan pencegahan anti korupsi dalam mengakses hak-hak tersebut. Pendidikan ini harus diarahkan untuk mewujudkan kemandirian kelompok difabel, seperti penguatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
- SPAK Indonesia khususnya para agennya di daerah perlu melakukan pendidikan anti korupsi dan membentuk agen-agen SPAK di komunitas/organisasi difabel untuk lebih memperluas jangkauan pengetahuan anti korupsi.
- Perlu adanya pendampingan bagi organisasi difabel dalam membangun SOP dan mekanisme pengelolaan keuangan yang transparan dan mengurangi potensi resiko timbulnya perilaku koruptif, korupsi dan pencucian uang,
- Medium dan mekanisme pemantauan program pemerintah yang saat ini ada misalnya LAPOR, JAGA, dsb, terutama yang terkait dengan hak-hak kelompok difabel harus dibuat dalam medium yang mudah diakses oleh kelompok difabel.
- Perlu adanya jaminan perlindungan bagi kelompok difabel ketika melaporkan dugaan korupsi/penyimpangan sehingga terbebas dari tekanan pihak manapun dan mendorong keberanian untuk melapor.
- Akses, partisipasi dan kontrol kelompok difabel terhadap bantuan dan pemenuhan hak-haknya perlu diperluas.
- Pembentukan jaringan dan komunitas informal dan bentuknya cair (co. Jakarta Barrier Free Tourism/JBFT)[26] di komunitas difabel juga dapat dimanfaatkan untuk mengadvokasikan berbagai kebutuhan difabel.

[26] Lihat https://www.genpi.co/gaya-hidup/8861/penyandang-disabilitas-juga-punya-komunitas-wisata-loh

BAGIAN V
ANTIKORUPSI, DEMOKRASI DAN PEMERINTAHAN

BAGIAN V

ANTIKORUPSI, DEMOKRASI DAN PEMERINTAHAN

CAPAIAN

1. Pada era reformasi lah agenda-agenda anti korupsi mulai dihidupkan kembali dan secara bersamaan menguatkan implementasi demokrasi. Setelah orde baru turun kemudian banyak disahkan aturan yang membatasi kekuasaan negara dan memperkuat demokrasi, misalnya TAP MPR No X/1998, TAP MPR VI/2000, Amandemen UUD 1945 yang menguatkan kembali hak-hak sipil warga negara dan pembatasan kekuasaan, Undang-undang Tipikor baru dan pembentukan KPK, dsb. Era reformasi memberikan angin harapan dan perubahan untuk kehidupan bernegara di Indonesia khususnya pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Dua puluh tiga tahun setelah era reformasi dimulai, Survei Nasional Perubahan Iklim yang dilakukan oleh INDIKATOR Politik Indonesia dan Yayasan Indonesia CERAH pada tahun 2021[27] menunjukkan bahwa isu korupsi tetap menjadi isu yang dianggap paling mengkhawatirkan/membahayakan negara Indonesia, bersama-sama dengan isu kerusakan lingkungan dan polusi.[28]
3. Praktek korupsi terbukti dapat mengendurkan norma dan praktik perlindungan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan dengan membentuk Undang-undang dan peraturan yang menguntungkan kepentingan para perusak lingkungan, memudahkan perizinan dalam kegiatan usaha tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan hingga melemahkan pengawasan serta penegakan hukum.[29] Khusus di Papua, banyak ditemukan praktik *state capture corruption,* manipulasi dan penipuan atas nama representasi kesepakatan suara masyarakat adat/lokal, tekanan fisik hingga berujung kekerasan pada masyarakat Papua serta manipulasi pelepasan hak atas tanah adat.[30]
4. Namun demikian, Pemerintah daerah dan masyarakat adat sudah mulai memahami dan mau berperan aktif melindungi wilayah adat serta lingkungan hidup didalamnya. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi perizinan Dinas Taman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Papua Barat, kajian dari Yayasan Econusa dan dukungan dari KPK yang mengakibatkan pembatalan izin usaha PT Papua Lestari Abadi dan PT Sorong Agro Sawitindo oleh Bupati Sorong. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Papua, menguatkan keputusan tersebut dan mencabut izin usaha perkebunan, izin lokasi, dan izin lingkungan yang mencakup 74.400 hektar lahan hutan.[31]

[27] Sekitar 4020 responden anak muda dari seluruh Indonesia (generasi Z dan Millenial) menjadi responden survey ini

[28] Hasil Survei isu penting yang membahayakan masa depan yaitu: Korupsi dengan jumlah 85%, Kerusakan Lingkungan 92% dan Polusi 74%. Lihat Indikator dan Yayasan Cerah, "Persepsi Pemilih Muda dan Pemula (Gen Z dan Millenial) atas Permasalahan Krisis Iklim Indonesia-Survey Nasional Perubahan Iklim", 2020. <http://www.cerah.or.id/id/detail-program/climate-change>., diakses pada tanggal 4 Januari 2022.

[29] Hariadi Kartodihardjo, "Korupsi dan Lingkungan Hidup", mengutip dari "Corruption is a Threat to Planet Earth", Kelsey Landau dan Joseph Glandof, https://bit.ly/3LtkFZh , diakses pada 24 Januari 2022.

[30] Greenpeace Indonesia, "Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua", https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/04/ea2fa3a3-stop-baku-tipu_sisi-gelap-perizinan-tanah-papua_bahasa.pdf diakses pada 25 Januari 2022.

[31] Lihat https://econusa.id/id/ecoblog/ptun-tolak-gugatan-perusahaan-sawit-kemenangan-untuk-masyarakat-adat-papua-barat/

5. Organisasi pemuda di tingkat lokal maupun nasional, baik yang berbasis umum maupun keagamaan juga mulai bergerak di isu perlindungan lingkungan hidup. Sejauh Mata Memandang misalnya, brand fashion lokal yang berdiri tahun 2014 ini memanfaatkan tekstil dari material baru yang ramah lingkungan, mengkampanyekan isu krisis iklim, membuat pameran dan video untuk mendorong pengurangan sampah plastik dan tekstil. Di Nusa Tenggara Timur ada komunitas Lakoat Kujawas yaitu komunitas masyarakat adat Molo yang melakukan pengarsipan pengetahuan dan kesenian adat serta mengembangkan pendidikan budaya lokal berbasis nilai-nilai adat yang dekat dengan alam dan lingkungan ekologis. Komunitas ini juga mengembangkan kewirausahaan sosial khususnya di kalangan muda.
6. Mulai ada jejaring yang dibangun antar pemuda adat di daerah yang berbeda di Indonesia, bahkan lintas regional memanfaatkan teknologi dan sosial media. Hal ini memungkinkan adanya dialog dan pembelajaran antar pemuda adat.
7. Gerakan sosial anak muda di Indonesia sebenarnya sudah sejalan dengan berbagai agenda penting global seperti isu iklim, lingkungan hidup dan korupsi. Mayoritas anak muda umumnya ingin langsung melakukan tindakan konkrit (*call to action*) ketika ada permasalahan sosial di masyarakat.
8. Sudah ada upaya untuk membuka rantai korupsi di sektor lingkungan misalnya dengan pengajuan permohonan akses publik oleh masyarakat sipil atas peta dan nama pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Tujuannya agar publik dapat melihat pola kepemilikan asli (*beneficial ownership)*, kerugian negara akibat hutang pembayaran pajak HGU dan Land Banking.
9. Permohonan akses di atas dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan peta dan nama pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di provinsi Papua dan Papua Barat merupakan informasi yang terbuka bagi publik, dan pengadilan memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan akses informasi tersebut kepada publik.[32]
10. Indonesia sebenarnya sudah memiliki beberapa peraturan yang memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dan kelompok masyarakat tertentu[33] seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan berbagai undang-undang untuk kelompok disabilitas, perempuan dan anak.[34]

[32] Lihat Siaran Pers Green Peace pada https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/4660/ptun-memutuskan-peta-dan-nama-pemegang-hgu-papua-dan-papua-barat-terbuka-untuk-publik/ diakses pada 19 Januari 2022

[33] Kelompok rentan dalam peraturan perundangan di Indonesia antara lain adalah kelompok lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan penyandangan cacat dan korban bencana alam. Sementara yang dikategorikan dalam kelompok masyarakat tertentu selain dari kelompok rentan antara lain janda/duda PNS, anak cacat, masyarakat hukum adat/tradisional, warga binaan, penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkotika dan psikotropika, sindroma ketergantungan, ODHA, penganut aliran kepercayaan, perempuan korban perkosaan, anak korban dan saksi, buruh, buruh perempuan, pencari keadilan, penduduk daerah terpencil, anak dalam situasi darurat, anak dalam kelompok minoritas, anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, anak korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, korban pornografi dan anak dengan HIV/AIDS, perempuan korban KDRT, Orang Asli Papua, anak dalam konflik bersenjata, kelompok ras tertentu. Kelompok masyarakat tertentu pada prinsipnya adalah pengelompokan masyarakat tertentu yang dilakukan dengan mengidentifikasi suatu norma pengaturan dalam UU; apakah materi muatan dalam suatu pasal tersebut menyebutkan suatu kelompok masyarakat yang memiliki pengaturan khusus yang berbeda dari kelompok masyarakat secara umum. PSHK, "Pengembangan Strategi Advokasi Anti Diskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia", https://pshk.or.id/publikasi/laporan-studi-pengembangan-strategi-advokasi-antidiskriminasi-bagi-kelompok-rentan-di-indonesia/ , hal 23-35. Diakses pada 24 Januari 2022.

[34] Beberapa Undang-undang lainnya misalnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan juga

TANTANGAN

- Dalam lima tahun terakhir, situasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemunduran signifikan. Hal ini terlihat dari berbagai larangan dalam pelaksanaan kegiatan publik, munculnya operasi militer illegal; pembunuhan di luar proses hukum, jalannya pemerintahan yang koruptif, pembentukan kebijakan negara yang melegalkan kekuasaan dan melemahkan demokrasi[35] hingga pembangunan infrastruktur dalam skala besar namun di saat yang bersamaan merampas ruang hidup rakyat.[36]
- Pada masa pasca orde baru/reformasi, korupsi akhirnya meluas ke daerah sebagai akibat dari otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan elit penguasa di pusat ke daerah. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi mengingat luasnya wilayah Indonesia, kompleksitas permasalah masing-masing daerah termasuk beragamnya modus dan pelaku korupsi.
- Korupsi di sektor lingkungan mengancam kehidupan masyarakat adat yang umumnya tinggal dan hidup bersama ekosistem lingkungan hidup seperti hutan. Keuntungan finansial/ekonomi jatuh pada oknum pejabat negara dan pelaku usaha tetapi tidak memberikan dampak pada kualitas kehidupan masyarakat adat.[37]
- Praktek korupsi lainnya terlihat dari upaya-upaya pengabaian nilai-nilai adat dan kearifan lokal, sistem dan kebijakan pembangunan yang masih timpang serta masifnya penggunaan tanah dan hutan ulayat menjadi hutan industri tambang. Kelompok masyarakat rentan lainnya seperti kelompok minoritas beragama, kelompok miskin dan juga kelompok yang kritis terhadap pemerintah/negara masih mengalami tekanan dan tidak diberikan partisipasi yang luas dalam pengambilan kebijakan negara.

[35] Beberapa catatan YLBHI terhadap kebijakan tersebut antara lain: 1) Rencana darurat sipil dalam penanganan Covid-19, 2) Rencana pembebasan Napi Korupsi akibat Covid-19, 3) Penggunaan sanksi pidana denda bagi pelanggaran PSBB, 4) Pelibatan militer dalam protokol kesehatan, 5) pengamanan Pam Swakarsa, 6) Rancangan Perpres Tugas TNI dalam Aksi Terorisme, 7) Komersialisasi jasa pengamanan oleh Polisi dan Militer oleh perusahaan, 8) Pemberangusan kebebasan berpendapat oleh Surat Telegram Kapolri, 9) Revisi UU dan Agenda pelemahan KPK, 10) Pengesahan UU Cipta Kerja, 11) Pengesahan Perpu 1/2020 menjadi UU 2/2020, 12) Larangan mengambil foto dan rekaman persidangan tanpa izin, 12) SK Menko Polhukam No. 38/2019 tentang Tim Asistensi Hukum, 13) Penggunaan pasal makar oleh kepolisian secara sembarangan, 14) Ancaman penerapan UU Terorisme, UU ITE dan KUHP bagi yang Golput, 15) Rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional, 15) R RKUHP masih mencantumkan pasal makar, penghinaan presiden dan penodaan agama, 16) Perluasan penempatan militer di Kementerian dan memasukkannya dalam Revisi UU TNI, 17) Pengaburan batas peran TNI dalam urusan pertahanan di UU 5/2018 tentang Perubahan UU 15/2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU, 18) Upaya penghambatan, pembubaran, bahkan kekerasan dan penangkapan aksi damai warga, 19) MoU Kementerian-kementerian dengan TNI, 20) Permendagri No 3/2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian yang membatasi kajian masyarakat sipil, 21) UU 16/2017 tentang Perubahan atas UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

[36] YLBHI, "Catahu 2017: Reformasi Bergerak Mundur, Demokrasi Digerogoti", "Derita Rakyat di bawah Kuasa Modal" (2018), "Reformasi Dikorupsi" (2019), "Otoritarian telah Sempurna Kembali ke Indonesia Dalam Kadar Tertentu" (2020).

[37] Provinsi Papua Barat misalnya memiliki Kawasan hutan 34 juta hektar dengan total nilai kayu setidaknya 35 ribu Triliun Rupiah. Dalam Kawasan hutan tersebut setidaknya ada 640.000 hektar perkebunan. Berdasarkan riset Econusa, dari jumlah tersebut hanya sekitar 170.000 hektar saja yang memiliki izin untuk melakukan penanaman sawit dengan 74.000 hektar lahan yang telah ditanami dan sekitar 17.000 hektar lahan perkebunan sawit yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan (PBB P3). Diambil dari Paparan Cindy Simangunsong (Yayasan Econusa). Lihat juga https://econusa.id/id/ecoblog/mengembalikan-hutan-papua-barat-kepada-pemiliknya/ diakses pada 20 Januari 2022.

- Masih adanya miskonsepsi tentang budaya adat yang distigma tidak modern, kurang layak dan tidak sesuai dengan pembangunan ekonomi serta kebijakan pemerintah.[38] Polarisasi juga terjadi antar kelompok masyarakat yang berbeda pendapat, sehingga memudahkan pemerintah/negara untuk mendapatkan dukungan dari kelompok masyarakat tertentu walaupun kebijakan yang dikeluarkan tidak demokratis atau represif.
- Putusan pengadilan yang pro lingkungan dan membuka akses informasi publik ternyata belum dilaksanakan oleh pemerintah. Informasi data HGU di Kemenko Perekonomian, Dirjen Perkebunan Kementerian, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK yang sudah diputuskan terbuka masih ditutup.[39] Menteri atau pejabat publik lainnya memanfaatkan celah pada kebijakan internal instansinya sendiri untuk mendukung kepentingan pelaku usaha dibandingkan keberlanjutan lingkungan hidup.[40]
- Praktek korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum masih terjadi. Perlindungan hukum bagi kelompok rentan/marginal masih belum optimal. Seringkali kasus-kasus pengabaian hak ataupun kebijakan yang tidak adil ditarik setelah timbul tekanan atau menjadi kontroversi publik.
- Gerakan sosial oleh kelompok muda saat ini masih bersifat kasuistis sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sistemik dan struktural dan menuntut perubahan kebijakan serta sistem.[41]Tuntutan anak muda atas berbagai permasalahan sosial di masyarakat serta tuntutan perubahan masih belum ditanggapi oleh generasi sebelumnya dengan perubahan sistemik. Generasi muda yang kritis juga belum diberikan ruang dan kepercayaan lebih untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan.

[38] Kebijakan pemerintah yang memaksakan standarisasi rumah modern pada masyarakat adat Molo misalnya berdampak pada perubahan pola konsumsi, krisis pangan dan malnutrisi. Secara jangka panjang hal ini juga menyebabkan urbanisasi masyarakat adat ke perkotaan, perdagangan orang serta hilangnya relasi orang muda dengan lingkungan dan pangan.

[39] Lihat https://www.hukumonline.com/berita/a/kebijakan-kemenko-perekonomian-tutup-informasi-hgu-menabrak-putusan-ma-lt5cd3afb51ae97

[40] Sebagai contoh KLHK yang tetap meneruskan kebijakan pelepasan kawasan hutan pada 22 perusahaan kelapa sawit di Indonesia padahal bertentangan dengan kebijakan moratorium sawit yang dikeluarkan KLHK sendiri mulai 2018.

[41] Sebagai contoh, gerakan anti kekerasan seksual yang dimulai oleh kelompok muda melalui tulisan artikel di media tentang kasus pemerkosaan anak. Artikel ini kemudian memberikan tekanan yang kuat dimana akhirnya pelaku dihukum berat dan terbitlah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Gerakan tagar #PercumaAdaPolisi misalnya dimulai dari kekecewaan anak muda terhadap penanganan kasus yang dinilai tidak sesuai prosedur, juga tindakan anggota polri yang tidak simpatik kepada masyarakat. Namun demikian sampai dengan saat ini RUU PKS belum disahkan dan belum terlihat ada perubahan fundamental dan sistematis yang dilakukan oleh institusi kepolisian untuk merespons tuntutan tersebut.

- Pemberitaan beberapa media bias kepentingan penguasa/kelompok tertentu. Media juga rentan untuk digunakan sebagai sarana misinformasi, serta polarisasi di masyarakat termasuk menekan oposisi. Propaganda juga banyak dilakukan untuk menambah jumlah informasi yang salah/hoax sehingga masyarakat kesulitan untuk memvalidasi kebenaran suatu informasi dan memahami mana informasi yang benar dan salah.
- Pengaturan Undang-undang yang memberikan perlindungan bagi kelompok rentan terutama kekerasan yang terjadi pada perempuan, anak dan kelompok disabilitas. Namun demikian, banyak yang menilai bahwa sampai saat ini perlindungan masih dilakukan secara parsial dan berbasis identitas. Akibatnya jangkauan undang-undang dalam mengakui dan melindungi kelompok rentan dalam berbagai lapisan kerentanan tersebut menjadi terbatas.[42] Penerapan UU TPPO misalnya masih belum optimal karena terkendala oleh pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan TPPO yang masih minim. Selain itu pengawasan dan penegakan hukum UU TPPO oleh penegak hukum belum konsisten.[43]
- Praktek korupsi atas anggaran negara untuk berbagai layanan dasar dan fasilitas juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk termasuk menyebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan dan tingginya tekanan ekonomi. Akibatnya masyarakat mudah diperdaya oleh pelaku dengan iming-iming pekerjaan atau gaji yang tinggi dan akhirnya menjadi korban TPPO.
- Modus atau tipologi korupsi yang dilakukan oleh oknum instansi pemerintahan, perusahaan maupun oknum perseorangan antara lain: biaya tambahan, pemerasan dan penyuapan proses verifikasi Surat Izin Penempatan dan Pemberangkatan Tenaga Kerja, penyalahgunaan jaminan uang perlindungan bagi pengiriman tenaga kerja, pemalsuan berbagai dokumen dan sertifikat dari Dinas Dukcapil, penggelapan uang BPJS tenaga kerja luar negeri, dsb.[44]
- Publik saat ini juga sudah mulai melihat modus korupsi baru yang juga berdampak pada maraknya kekerasan perempuan seperti Sextortion.[45] Penelitian TII menemukan bahwa sepanjang tahun 2019/2020, Indonesia menduduki urutan pertama dari negara-negara Asia dengan tingkat sextortion tertinggi.[46]

---

[42]PSHK, "Pengembangan Strategi Advokasi Anti Diskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia", https://pshk.or.id/publikasi/laporan-studi-pengembangan-strategi-advokasi-antidiskriminasi-bagi-kelompok-rentan-di-indonesia/ , hal 25. Diakses pada 24 Januari 2022

[43]Data SIMPONI PPA maka Korban TPPO sepanjang periode 2016-2020 adalah sebanyak 1421 orang. Sekitar 90% dari jumlah tersebut ada perempuan dan sisanya 9% laki-laki. Sepanjang 2021 Kepolisian menangani sebanyak 17 kasus TPPO yang melibatkan 63 korban perempuan dewasa dan 6 korban perempuan anak.

[44]Paul Sinlaeloe PIAR NTT, "Korupsi dan Kejahatan terhadap Perempuan", dipaparkan pada Webinar "VOI dan Kejahatan terhadap Perempuan" Rabu 15 Desember 2021. Hal ini sejalan juga dengan temuan sementara dari peneltian yang dilakukan oleh SPAK Indonesia dan DP3A Sulawesi Selatan mengenai Korupsi dalam TPPO di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 (materi paparan dari Yudha Yunus, Peneliti SPAK Indonesia).

[45]Sextortion diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual, seringkali terjdi sebagai imbalan atas layanan publik, seperti layanan pendidikan dan Kesehatan. Istilah ini juga sering dikenal sebagai pemerasan seksual. (paparan Judhi Kristantini Webinar "VOI dan Kejahatan terhadap Perempuan" Rabu 15 Desember 2021.

[46]Lihat https://www.medcom.id/nasional/hukum/ob3eyoyK-survei-pemerasan-seksual-di-indonesia-mengkhawatirkan-nomor-1-dari-17-negara-asia

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

- Langkah konkrit yang harus dilakukan dalam melawan korupsi di sektor lingkungan dari sekedar integritas, misalnya:
  - Menempatkan masyarakat adat pemilik tanah ulayat sebagai aktor utama dalam mengelola lahan dan hutan
  - Menghentikan semua operasional perusahaan yang memperoleh pelepasan Kawasan hutan hingga proses evaluasi selesai dilakukan
  - Mencabut atau mengurangi luasan izin usaha perkebunan yang memiliki tutupan hutan alam
  - Menerapkan sanksi bagi perusahaan yang terbukti melanggar regulasi yang berlaku dalam pelepasan Kawasan hutan dan perizinan perkebunan
  - Memeriksa dan menghukum setiap orang yang terbukti terlibat dalam pengaturan izin Tahan Papua
- Perlu disahkannya Undang-undang Masyarakat Hukum Adat untuk memberikan posisi dan perlindungan hukum lebih kuat atas keberlangsungan hidup masyarakat adat yang umumnya erat dengan alam dan lingkungan hidup.
- Kelompok muda dalam masyarakat adat perlu lebih memahami hak-hak adat mereka terutama mengenai tanah/wilayah adat, tulisan ilmiah dan kajian berbasis data mengenai masyarakat dan wilayah adat harus lebih ditingkatkan dan disebarluaskan, perlu pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terutama dalam penggunaan lahan/tanah ad
- Masyarakat sipil harus berjuang tidak hanya mengarusutamakan isu perlindungan lingkungan ini secara luas dan membuat kegelisahan publik semata, namun juga mendorong lebih banyak orang yang berani mengambil tindakan dalam melindungi lingkungan hidup dimulai dari kehidupan pribadinya, lingkungan sekitar kemudian masyarakat luas. Begitu juga dengan masalah perlindungan atas kelompok rentan (co: perempuan dalam kasus TPPO) harus diutamakan agar masyarakat paham dan dapat terlibat dalam pencegahannya. Upaya ini juga harus dilakukan dengan memberikan pemahaman dampak dari korupsi terhadap maraknya TPPO itu sendiri. at dan hutan.

- Masyarakat sipil secara umum di Indonesia harus menjalankan peran-peran strategis dalam membangun kembali demokrasi dan Gerakan Anti Korupsi di Indonesia misalnya:
    - Memfasilitasi dan terus mendorong gerakan sosial/rakyat
    - Menghadirkan/memperkuat ide, gagasan dan narasi
    - Memperkuat kaderisasi, jejaring dan komunitas
    - Konsolidasi dan saling mendukung antar kelompok masyarakat sipil di berbagai isu/sektor/disiplin yang berbeda
    - Menemukan inovasi-inovasi dalam advokasi dan memiliki kemandirian serta keberlanjutan pergerakan, menggunakan sosial media, platform online dsb.
    - Hadir di semua aktifitas perlawanan dan perebutan hak-hak
    - Melakukan amplifikasi narasi dan informasi berkualitas yang dapat melawan berita bohong/hoax, propaganda rezim (via bots, buzzer, influencers, manipulasi media, dsb)

BAGIAN VI
ANTIKORUPSI DAN SENI

BAGIAN VI
ANTIKORUPSI DAN SENI

CAPAIAN

1. Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan sosial di masyarakat termasuk Gerakan antikorupsi memanfaatkan seni sebagai bagian dari kampanye untuk lebih menyebarluaskan dan menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Komisi Pemberantasan Korupsi sejak awal pembentukannya sering melakukan kegiatan kampanye dan pendidikan masyarakat menggunakan media film, lagu, dongeng, foto dan komik serta karya seni lainnya. Sebut saja film pendek Kita Versus Korupsi juga pernah dibuat oleh KPK pada tahun 2012 bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil dan penggiat seni tentang bagaimana praktik korupsi terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Film layar lebar mengenai dampak korupsi terhadap kehidupan berkeluarga yaitu "Sebelum Pagi Terulang Kembali" juga pernah ditayangkan di berbagai bioskop di Indonesia.

2. Anak muda misalnya, sudah tidak asing lagi dengan berbagai kompetisi pembuatan poster dan film pendek mengenai korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil, kampus bahkan perusahaan.[47] Deklarasi #SeniLawanKorupsi dan pameran bertema sama juga diluncurkan tahun 2015 oleh para penggiat seni yang bertujuan untuk melakukan perlawanan lewat jalan seni baik secara individual maupun ruang--ruang dan kesadaran publik.[48]

3. Rumah produksi audio visual dan dokumenter seperti Watchdog juga tumbuh menghasilkan karya dokumenter mengangkat berbagai masalah sosial, lingkungan, hak asasi manusia dan juga korupsi. Watchdog menyebarkan jurnalisme investigasinya lewat medium yang mudah diakses oleh masyarakat seperti youtube. Penyebaran juga dilakukan melalui berbagai acara melibatkan kelompok marginal/rentan misalnya dengan mengadakan layar tancap di kampung-kampung, nonton bareng di sekolah, kampus, dsb.

4. Koalisi Seni pada tahun 2015/2016 telah melakukan riset tentang keberlangsungan lembaga seni di 8 Kota dan menemukan beberapa permasalahan/titik rawan untuk dapat menerapkan *good governance* dan akuntabilitas keuangan lembaga seni.[49] Menindaklanjuti temuan penelitian tersebut, sepanjang tahun 2015/2016, Koalisi Seni melakukan perbaikan tata kelola organisasi dan keuangan, menyelenggarakan seminar literasi finansial dan mengawal anggaran kegiatan seni dan kebudayaan yang ada.

[47] *Anti-Corruption Film Festival* (ACCFest) yang pertama kali digelar pada tahun 2013 ini menggalang anak muda untuk berkompetisi membuat film pendek yang mengkampanyekan nilai-nilai antikorupsi Lihat https://acch.kpk.go.id/id/acffest2020 diakses pada 20 Januari 2022.

[48] "Deklarasi Seni Lawan Korupsi", https://dkj.or.id/artikel/deklarasi-seni-lawan-korupsi/ diakses pada 28 Januari 2022.

[49] Permasalahan tersebut umumnya mengenai tata kelola organisasi dan keuangan yang baik dan akuntabel, misalnya masalah sumber pendanaan, laporan keuangan, manajemen organisasi, AD ART dan isu-isu tata kelola lainnya. Penelitian ini juga menunjukkan praktek korupsi eksternal yang terjadi di ranah kesenian yang berdampak pada penggiat seni dan kegiatan seni yang dilakukan. Maraknya praktek ketidaksesuaian pencairan jumlah dana bantuan pemerintah yang berbeda dari jumlah yang ditetapkan, indikasi penggelapan dana seperti potongan atas dana kegiatan seni, pencairan dana tunai hingga tekanan dalam penandatanganan kwitansi kosong kerap dialami oleh penggiat seni. Koalisi seni juga menemukan bahwa penggiat/kelompok seni mendapatkan tawaran jasa perantara untuk memudahkan permohonan dana dari pemerintah.

5. Tagar #GejayanMemanggil dan Aliansi Rakyat Bergerak dimulai dengan aksi mahasiswa di Yogyakarta (titik aksi di Jl Gejayan) terkait pembahasan beberapa RUU yang kontroversial seperti RKUHP, RUU KPK, RUU Ciptakerja, RUU Pertahanan, dsb. Saat ini Aliansi Rakyat Bergerak juga melibatkan masyarakat umum khususnya pemuda dalam mengadvokasikan berbagai masalah sosial. Sebenarnya aksi mahasiswa di Jl Gejayan ini sudah ada sejak tahun 1998 namun lebih meluas dan viral di tahun 2015 di media sosial akibat penggunaan simbol-simbol dalam bentuk mural, desain grafis dan ilustrasi dalam gerakannya. Kolaborasi dilakukan tidak hanya dengan para seniman yang membagikan karya seninya dalam aksi, namun juga banyak masyarakat umum yang ikut membuat karya seni dan mural sejalan dengan tuntutan aksi dan memberikan donasi untuk pembuatan mural dan kegiatan aksi.

6. Peluang pesatnya perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi produksi karya seni yang di masa lalu sulit untuk dilakukan. Pembuatan film dilakukan dengan kamera DSLR sederhana atau handphone. Proses pengeditan juga lebih mudah tanpa harus menggunakan peralatan dan biaya yang mahal. Medium penyebaran juga lebih banyak dan murah misalnya lewat youtube atau media sosial yang dapat mencapai lebih banyak penonton dengan waktu yang relatif singkat.[50] Berbagai aplikasi pembuatan desain grafis, *memes* dan ilustrasi tersedia dan murah. Metode "Nonton Bareng (Nobar)" dan Diskusi bedah film dapat dipilih untuk mendorong tindak lanjut atas isu yang diangkat.

[50] "Sexy Killers" film yang dibuat Watchdog tentang industri pertambangan dan dampak negatifnya atas lingkungan yang diunggah bulan September 2019 yang lalu di youtube sudah ditonton oleh 36 juta orang. Dalam waktu 1 minggu film ini sudah diputar dan didiskusikan oleh 480 komunitas. Film lain "KPK End Game" ditonton oleh 4,3 juta orang di youtube dan dalam waktu 1 bulan diputar dan didiskusikan oleh 1500 komunitas.

TANTANGAN

- Pemerintah khususnya aparat keamanan sangat represif terhadap karya seni misalnya dengan menghapus mural yang berisikan kritik sosial dengan alasan mengganggu keindahan dan estetika ruang publik atau bahkan dianggap mengancam jalannya pemerintahan. Padahal budaya gambar dan mural di Indonesia sudah ada sejak masa kemerdekaan untuk menggugah perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.
- Munculnya berbagai ancaman serangan balik dari koruptor dan pendukungnya terhadap aktivitas seni melawan korupsi seperti menggunakan UU ITE, KUHP (co: pasal pencemaran nama baik), adanya hacking, bullying, doxing.[51] Undang-undang Kekarantinaan juga membatasi aksi yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk kebebasan berekspresi
- Seringkali publik merasa sudah melakukan sesuatu/terlibat aktif dengan hanya memberikan komentar, *like* dan *share* di media sosial tanpa diikuti dengan tindakan konkrit.
- Media mainstream (co. Televisi, radio, media cetak dan elektronik) seringkali dipergunakan untuk menyebarkan pesan dan informasi yang bias kepentingan penguasa dan pemilik modal. Karya seni yang ditampilkan dalam media tersebut akhirnya tidak lagi jujur dan tidak menampilkan realita yang terjadi di masyarakat dan permasalahan sosial yang dihadapi sehari-hari.

[51] Paparan Panca (Watchdog) "Dokumenter dan Gerakan Antikorupsi", dipaparkan pada Konferensi Virtual Voice of Integrity 2021 – 15 Desember 2021, Panel 3, Seni dan Antikorupsi. Lihat juga https://cyberthreat.id/read/8094/ELSAM-Sebut-Ancaman-Baru-Pers-Dari-Hacking-Deface-DDoS-Hingga-Doxxing-dan-Bullying

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

- Mendorong komunitas seni untuk secara aktif dan konsisten menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam berkesenian dan kehidupan sehari-hari serta memperbaiki tata kelola berkesenian (co transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di internal kelembagaan, berani untuk menghindari perilaku koruptif, dsb).
- Perlu peningkatan kapasitas seluruh lapisan masyarakat (pelajar, mahasiswa, komunitas seni, profesi, perempuan, dll) untuk mampu dan mau memproduksi karya-karya dan mengarusutamakan isu korupsi menjadi milik mereka.
- Mendorong lebih banyak produksi konten advokasi antikorupsi dalam bentuk apa saja dengan berbagai platform/medium tentang kehidupan sehari-hari dan pengalaman yang mendorong perilaku antikorupsi.
- Membangun komunitas yang lebih besar di media sosial untuk menyebarkan produksi seni melawan anti korupsi (share, like, subscribe, dll).
- Membuat desain kampanye strategis (terencana) dan masif
- Menjembatani kesenjangan antara kegiatan online dan offline. Agar memberikan dampak, aktivisme online ini harus diikuti dengan aksi konkrit untuk mencegah dan menuntut agar perubahan melalui agenda anti korupsi dilaksanakan.
- Mencari kawan strategis (filmmaker, seniman, influencer, komunitas IT/teknologi, hacker, dan kelompok lain yang potensial) untuk berkolaborasi dan berjejaring dalam memproduksi karya seni yang mendukung gerakan antikorupsi.

PENUTUP

Prosiding Voice of IntegrityTalk.ID ini kami persembahkan bagi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda, yang tidak henti mencari jalan untuk membebaskan negeri ini dari korupsi. Semoga semua yang termuat di dalam prosiding ini: harapan, pernyataan sikap, kritik, usulan dan seluruh ide-ide baik, menjadi titik tolak untuk mewujudkan berbagai perubahan. Dan semoga kolaborasi yang telah terbangun terus berlanjut, karena korupsi harus dihadapi bersama semua elemen bangsa.

Terima kasih pada seluruh pihak yang telah berkolaborasi hingga Voice of Integrity 2021: Nothing but Integrity dapat terlaksana dengan lancar:

- V20 Indonesia: Co Sherpa V20 Indonesia, Ibu Alissa Wahid
- G20 Indonesia: Co Sherpa G20 Indonesia, Bapak Dr. Edi Prio Pambudi, S.E., M.A., Koordinator Harian I Bidang Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia 2022
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Komisi Pemberantasan Korupsi
- Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2)
- Nenilai
- Daya Lima
- PT Paragon Technology and Innovation diwakili oleh Bapak Salman Subakat
- Stoik Trisula
- Pantarei
- Siberkreasi
- Komunitas Pemuda Pantau Pengadaan Barang dan Jasa
- Partai Solidaritas Indonesia
- Econusa
- Lakoat Kujawas
- Sejauh Mata Memandang
- Greenpeace Indonesia
- CISDI
- 10 Pemuda
- Pemimpin.id
- Wings of Bangtan
- Pandemic Talks
- Koalisi Seni Indonesia
- Watchdog
- Gejayan Memanggil
- ICW
- Transparansi Internasional Indonesia
- YLBHI
- Public Virtue Institute
- Project Multatuli
- Bung Hatta Anti-corruption Award
- Piar NTT
- ASEAN Act
- ICJ Makassar
- Kailani
- Guru Pembangun Peradaban: Ibu Endah Winarsih
- Sekolah peserta Program Organisasi Penggerak – Kemendikbudrisek: Bapak Slamet
- Sekolah Gemala Ananda: Jasmin Jasin
- Perkumpulan Homeschooler Indonesia: Ellen Kristi
- ICEL: Difa Shafira
- Para Agen SPAK
- Sobat IntegrityTalk.ID

Dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih juga pada seluruh peserta Voice of Integrity 2021: Nothing but Integrity yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi di seri webinar Road to Integrity, plenary dan kelima panel.

Mari terus berkolaborasi dan sampai bertemu kembali di Voice of Integrity 2022.

Salam Antikorupsi!